

# KEBUDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

Oleh: Kusnadi<sup>1</sup>

## Pengantar

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan<sup>2</sup>. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007). Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Dalam tulisan ini, saya memahami konstruksi masyarakat nelayan dengan mengacu pada konteks pemikiran di atas, yaitu suatu konstruksi masyarakat yang kehidupan sosial budayanya dipengaruhi secara signifikan oleh eksistensi kelompok – kelompok sosial yang kelangsungan hidupnya bergantung pada usaha pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir. Dengan memperhatikan struktur sumber daya ekonomi lingkungan yang menjadi basis kelangsungan hidup dan sebagai satuan sosial, masyarakat nelayan memiliki identitas kebudayaan yang berbeda dengan satuan-satuan sosial lainnya, seperti petani di dataran rendah, peladang di lahan kering dan dataran tinggi, kelompok masyarakat di sekitar hutan, dan satuan sosial lainnya yang hidup di daerah perkotaan.

Bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai ”pedoman kehidupan”, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69). Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga

---

<sup>1</sup>Antropolog dan staf pengajar Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ) dan Jurusan Sosiologi FISIP UNEJ, serta mantan Kepala Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Lembaga Penelitian UNEJ (2003-2009). Makalah ini disampaikan dalam kegiatan *JELAJAH BUDAYA TAHUN 2010*, dengan tema “Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan di Pantai Utara Jawa”, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta, tanggal 12-15 Juli 2010.

<sup>2</sup>Berdasarkan hasil riset, Fachrudin dkk. (1976) mengelompokkan, desa-desa pesisir ke dalam empat jenis, yaitu: (1) desa pesisir tipe bahan makanan, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani sawah; (2) desa pesisir tipe tanaman industri, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tanaman industri; (3) desa pesisir tipe nelayan/empang, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, dan pembudidaya perairan; dan (4) desa pesisir tipe niaga dan transportasi, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermatapencaharian sebagai pedagang antarpulau dan penyedia jasa transportasi antarwilayah (laut) (Hasanuddin, 1985: 108).

masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yang disepakati secara sosial (Kluckhohn, 1984:85, 91).

Perspektif antropologis untuk memahami eksistensi suatu masyarakat bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Karena itu, dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian akan menampilkan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai upaya memahami masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, berikut ini akan dideskripsikan beberapa aspek antropologis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas kebudayaan masyarakat nelayan, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola eksploitasi sumber daya perikanan, dan kepemimpinan sosial.

### **Sistem Gender**

Sistem gender adalah sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labor by sex*) dalam masyarakat nelayan yang didasarkan pada persepsi kebudayaan yang ada. Dengan kata lain, sistem gender merupakan konstruksi sosial dari masyarakat nelayan yang terbentuk sebagai hasil evolutif dari suatu proses dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Sebagai produk budaya, sistem gender diwariskan secara sosial dari generasi ke generasi. Berdasarkan sistem gender masyarakat nelayan, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan "laut" merupakan "ranah kaum laki-laki", sedangkan wilayah "darat" adalah ranah kerja "kaum perempuan".

Pekerjaan-pekerjaan di laut, seperti melakukan kegiatan penangkapan, menjadi ranah laki-laki karena karakteristik pekerjaan ini membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, kecepatan bertindak, dan berisiko tinggi. Dengan kemampuan fisik yang berbeda, kaum perempuan menangani pekerjaan-pekerjaan di darat, seperti mengurus tanggung jawab domestik, serta aktivitas sosial-budaya dan ekonomi. Kaum perempuan memiliki cukup banyak waktu untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Sebagian besar aktivitas perekonomian di kawasan pesisir melibatkan kaum perempuan dan sistem pembagian kerja tersebut telah menempatkan kaum perempuan sebagai "penguasa aktivitas ekonomi pesisir". Dampak dari sistem pembagian kerja ini adalah kaum perempuan mendominasi dalam urusan ekonomi rumah tangga dan pengambilan keputusan penting di rumah tangganya (Kusnadi, 2001). Dengan demikian, kaum perempuan tidak berposisi sebagai "suplemen" tetapi bersifat "komplemen" dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

Persepsi masyarakat nelayan terhadap perempuan yang bekerja di sektor publik terbagi menjadi tiga, yaitu: persepsi konservatif, moderat bersyarat, dan kontekstual dinamis (Kusnadi, Hari Sulistiyowati, Adi Prasodjo, dan Sumarjono, 2006:67-76). Jika persepsi "konservatif" dan pandangan "moderat bersyarat" dianut oleh sebagian kecil masyarakat nelayan, sebaliknya pandangan "kontekstual-dinamis" dianut oleh sebagian besar warga masyarakat nelayan. Persepsi kontekstual-dinamis lebih rasional dalam menilai perempuan pesisir yang bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi-kondisi sosial ekonomi lokal. Persepsi ini memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik dengan tidak mengorbankan tanggung jawab domestiknya.

Dalam rumah tangga nelayan miskin, kaum perempuan, isteri nelayan, mengambil peranan yang strategis untuk menjaga integrasi rumah tangganya. Modernisasi perikanan yang berdampak serius terhadap proses pemiskinan telah menempatkan kaum perempuan sebagai penanggung jawab utama kelangsungan hidup rumah tangga nelayan (Kusnadi, 2003:69-83). Jika pemerintah menggagas program-program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan nelayan, kaum perempuan dapat ditempatkan sebagai subjek pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat ditempuh secara tepat dan efisien.

### **Relasi Patron-Klien**

Pada umumnya, relasi patron-klien terjadi secara intensif pada suatu masyarakat yang menghadapi persoalan sosial dan kelangkaan sumber daya ekonomi yang kompleks. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang berbasis pertanian, seorang patron (*bapak buah*) akan membantu klien (*anak buah*) kemudahan akses pada peluang kerja di sektor pertanian, mengatasi kebutuhan mendadak klien, atau meringankan beban utang klien pada pelepas uang. Klien menerima kebaikan tersebut sebagai "hutang budi", menghargai, dan berkomitmen untuk membantu patron dengan sumberdaya jasa tenaga yang mereka miliki. Pola-pola relasi sosial yang demikian dapat dilihat pada hubungan antara pemilik lahan pertanian luas (petani kaya) dengan para buruh taninya dan orang-orang di sekitarnya yang kemampuan ekonominya terbatas (Eisenstadt dan Roniger, 1984:122-127; lihat juga, Jay, 1969).

Pada dasarnya, hubungan patron-klien berkenaan dengan: (a) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama; (b) hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*), hubungan pribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); (c) hubungan yang berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling memberi dan menerima (Legg, 1983:10-29). Sumber daya yang dipertukarkan dalam hubungan patron-klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dari masing-masing pihak. Kategori-kategori pertukaran dari patron ke klien mencakup pemberian: bantuan penghidupan subsistensi dasar, jaminan krisis subsistensi, perlindungan dari ancaman luar terhadap klien, dan memberikan sumbangan untuk kepentingan umum. Sebaliknya, arus barang dan jasa dari klien ke patron pada umumnya dengan menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apa pun bentuknya (Scott, 1993:8-10).

Prinsip-prinsip relasi patron-klien berlaku juga pada masyarakat nelayan. Unsur-unsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang (ikan) berskala besar dan kaya, nelayan pemilik (perahu) (*orenga*, Madura), juru mudi (juragan laut atau pemimpin awak perahu), dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi klien adalah nelayan buruh (*pandhiga*, Madura) dan warga pesisir yang kurang mampu sumber dayanya. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi di dalam aktivitas pranata ekonomi dan kehidupan sosial di kampung. Para patron ini memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan (Kusnadi, 2000). Kompleksitas relasi sosial patron-klien (vertikal) dan relasi sosial horisontal di antara mereka merupakan urat-urat struktur sosial masyarakat nelayan.

Dalam aktivitas ekonomi perikanan tangkap di kalangan nelayan Madura misalnya, terdapat tiga pihak yang berperan besar, yaitu pedagang perantara (*pangamba'*), nelayan pemilik perahu, dan nelayan buruh (Kusnadi, 2000). Ketiga pihak

terikat oleh hubungan kerja sama ekonomi yang erat. Pedagang perantara menyediakan bantuan dan pinjaman (uang) ikatan untuk nelayan pemilik dan nelayan buruh. Nelayan pemilik menyediakan bantuan dan pinjaman ikatan kepada nelayan buruh. Hubungan kerja sama ekonomi di antara mereka diikat oleh relasi patron-klien. Relasi sosial ekonomi berbasis patron-klien ini berlangsung intensif dan dalam jangka panjang. Relasi sosial ekonomi akan berakhir jika terjadi persoalan yang tidak bisa diatasi di antara mereka, sehingga pihak nelayan pemilik dan nelayan buruh harus melunasi utang-utangnya kepada pedagang perantara. Sedemikian dalamnya relasi patron-klien mendasari aktivitas ekonomi nelayan, sehingga ada peneliti yang menyebut organisasi ekonomi nelayan sebagai organisasi "ekonomi patron-klien" (Elfindri, 2002).

Selain di sektor ekonomi, relasi-relasi patron-klien juga terjadi intensif di kampung-kampung nelayan yang tingkat kemiskinannya tinggi. Sebagai contoh, dalam jaringan sosial berbasis hubungan ketetanggaan, orang-orang yang mampu (pedagang, nelayan pemilik, atau pihak lainnya) dan memiliki sumber daya ekonomi lebih dari cukup akan membantu tetangganya yang kekurangan. Biasanya bantuan tersebut berupa barang-barang natura, makanan, informasi, pakaian, dan upah jasa. Mereka yang telah ditolong itu akan membalas kebaikan tersebut dengan kesiapan menyediakan jasa tenaganya untuk membantu patron. Aktualisasi relasi patron-klien ini merupakan upaya menjaga kerukunan bersama, sehingga efek negatif kesenjangan sosial di kalangan masyarakat nelayan dapat diminimalisasi (Kusnadi, 2000). Realitas sosial demikian dan masih berfungsinya pranata-pranata budaya itu menunjukkan bahwa upaya sebagian akademisi memahami masalah sosial dalam masyarakat nelayan dari perspektif kelas, bukan hanya tidak tepat, tetapi juga menyesatkan secara akademis.

### **Pola-pola Eksploitasi Sumberdaya**

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, masyarakat nelayan kita memerankan empat perilaku sebagai berikut: (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti *trawl* atau *minitrawl*; serta (4) mengeksploitasi sumber daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2009:126-127).

Perilaku pertama, kedua, dan ketiga dianut oleh sebagian besar nelayan kita sebagai konsekuensi dari persepsi yang kuat terhadap sumber daya perikanan atau sumber daya kelautan yang bersifat *open access* bagi siapa pun yang mau memanfaatkannya. Perilaku keempat adalah perilaku minoritas di kalangan masyarakat nelayan, seperti ditunjukkan oleh adanya komunitas-komunitas adat atau komunitas lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif, kemandirian sosial, dan kelangsungan hidup. Komunitas-komunitas adat seperti ini tersebar di berbagai wilayah tanah air. Mereka menjaga dengan baik pranata-pranata pengelolaan sumber daya laut yang dimilikinya, seperti *sasi* di Maluku, *ondoafi* di Papua

Barat, *bati* di Ternate, *rompong* di Sulawesi Selatan, *tonass* di Sulawesi Utara, *awig-awig* di Nusa Tenggara Barat, *patenekan* di Banten, atau *gogolan* di Tegal. Klaim pemilikan atas sumber daya komunal ini dilegitimasi oleh sejarah sosial dan unsur-unsur identitas etnisitas yang mereka miliki (Kusnadi, 2009:127).

Perilaku eksploitatif yang tak terkendali berimplikasi luas terhadap kelangkaan sumberdaya perikanan dan kemiskinan nelayan. Di samping itu, kompetisi antarnelayan dalam memperebutkan sumber daya perikanan terus meningkat, sehingga berpotensi menimbulkan konflik secara eksplosif di berbagai wilayah perairan, khususnya di kawasan yang menghadapi kondisi *overfishing* (tangkap lebih). Kondisi-kondisi umum yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi timbulnya konflik nelayan adalah sebagai berikut.

- Kelangkaan atau semakin berkurangnya sumber daya perikanan, khususnya di perairan pantai, dan kondisi *overfishing*, yang disebabkan oleh beberapa hal penting, yaitu: eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekosistem pesisir-laut.
- Kegiatan eksploitasi sumber daya perikanan tidak disertai dengan kesadaran dan visi kelestarian atau keberlanjutan dalam mengelola lingkungan pesisir-laut, sehingga terjadi ketimpangan.
- Kegagalan pembangunan pedesaan di wilayah kabupaten/kota pesisir, sehingga meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumber daya laut dan kompetisi semakin meningkat.
- Belum adanya perencanaan dan aplikasi kebijakan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu dengan melibatkan *stakeholders* yang luas.

Selain itu, sebab-sebab khusus timbulnya konflik nelayan di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran jalur-jalur penangkapan, khususnya di perairan pantai (*inshore*).
2. Perebutan wilayah tangkapan (*fishing grounds*).
3. Perebutan lokasi rumpon dan pencurian ikan di lokasi rumpon.
4. Pengoperasian alat tangkap yang tingkat kualitasnya berbeda di antara dua kelompok nelayan (misalnya, nelayan pancingan dengan nelayan payang), sehingga hasil tangkapan yang diperoleh timpang.
5. Pengoperasian alat tangkap yang merusak kelestarian sumber daya perikanan, seperti *minitrawl* dan sejenisnya.
6. Penangkapan yang merusak lingkungan, seperti dengan bom ikan, potasium, dan sebagainya.

Dalam berbagai kasus konflik nelayan, sebab-sebab di atas sering saling tumpang tindih. Upaya untuk mengurangi tekanan penduduk terhadap sumber daya laut dan mengatasi *overfishing* melalui diversifikasi pekerjaan atau konversi pekerjaan tidak mudah dilakukan karena terbatasnya peluang kerja lainnya (*off-fishing*) di daerah pesisir. Ketergantungan nelayan terhadap laut sangat tinggi. Sebagai contoh kasus, dari hasil studi Purnomo (2005) terungkap bahwa sebagian besar (89,3%) dari nelayan-nelayan di Sampang, Bangkalan, Pasuruan, Sidoarjo, dan Surabaya tetap mempertahankan pekerjaannya menangkap ikan dan sebanyak 94,9% di antara mereka tetap

mempertahankan Perairan Selat Madura sebagai daerah operasi penangkapan. Padahal, Selat Madura sudah dalam kondisi *overfishing* sejak tahun 1996. Data ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya konflik nelayan masih cukup besar. Oleh sebab itu, upaya-upaya meresolusi konflik nelayan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, dengan pendekatan yang multidimensional.

### **Kepemimpinan Sosial**

Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan matapencarian penduduknya. Sebagian dari ciri-ciri perilaku sosial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran.
2. Kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan.
3. Apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian.
4. Terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung “kasar”.
5. Solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah.
6. Kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi.
7. Bergaya hidup “konsumtif”.
8. Demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi “keberhasilan hidup”.
9. ”Agamis”, dengan sentimen keagamaan yang tinggi.
10. ”Temperamental”, khususnya jika terkait dengan ”harga diri”.

Salah satu ciri perilaku sosial dari masyarakat pesisir yang terkait dengan sikap temperamental dan harga diri tersebut dapat disimak dalam pernyataan antropolog Belanda di bawah ini (Boelaars, 1984:62):

Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Ciri-ciri perilaku sosial di atas memiliki relevansi dengan ciri-ciri kepemimpinan sosial masyarakat pesisir. Berdasarkan kajian filologis atas naskah-naskah klasik (*kuno*) yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti *Kitab Sindujoyo Pesisiran* dan *Babad Gresik Pesisiran*, syarat-syarat pemimpin di kalangan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut (Widayati, 2001:3):

1. Siap menolong siapa saja yang meminta bantuan.

2. Mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri.
3. Dermawan kepada semua orang.
4. Selalu menuntut ilmu dunia dan akhirat untuk keseimbangan kehidupan.
5. Tidak berambisi terhadap jabatan atau kedudukan walaupun banyak berjasa.
6. Rendah hati (*tidak sombong*), tetapi tidak rendah diri (*minder*).
7. Sangat benci penindasan dan berbuat adil kepada siapa saja.
8. Rajin bekerja dan beribadah, khususnya shalat lima waktu.
9. Sabar dan bijaksana.
10. Berusaha membahagiakan orang lain.

Sebagian nilai-nilai perilaku sosial di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Demikian juga, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir memiliki relevansi yang baik untuk merekonstruksi kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat nelayan memiliki identitas kebudayaan yang spesifik dan terbangun melalui proses evaluasi yang panjang. Ciri-ciri kebudayaan di atas, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola perilaku dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan, serta kepemimpinan sosial tumbuh karena pengaruh kondisi-kondisi dan karakteristik-karakteristik yang terdapat di lingkungannya. Sebagai bagian dari suatu masyarakat yang luas, yang sedang bergerak mengikuti arus dinamika sosial, masyarakat nelayan dan kebudayaan pesisir juga akan terkena dampaknya. Kemampuan beradaptasi dan keberhasilan menyikapi tantangan perubahan sosial sangat menentukan kelangsungan hidup dan integrasi sosial masyarakat nelayan.

Deskripsi singkat tentang beberapa aspek antropologis masyarakat nelayan di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan bekal umum bagi para peserta “Jelajah Budaya Tahun 2010” yang akan melakukan kunjungan/kerja lapangan pada masyarakat nelayan di Pantai Utara Jawa. Tentu saja, masih banyak aspek-aspek kebudayaan lainnya yang perlu dipahami agar wawasan pengetahuan kita tentang masyarakat nelayan semakin komprehensif.-

## DAFTAR PUSAKA

- Boelaars, Yan 1984. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Eisenstadt, S.N. dan L. Roniger. 1984. *Patrons, Clients, and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elfindri. 2002. *Ekonomi Patron-Client: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang: Andalas University Press.
- Ginkel, Rob van. 2007. *Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publishers.
- Hasanudin, Basri. 1985. "Beberapa Hal Mengenai Struktur Ekonomi Masyarakat Pantai", dalam A.S. Achmad dan S.S. Acip (Peny.). *Komunikasi dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hal. 105-110.
- Jay, Robert R. 1969. *Javanese Villagers: Social Relation in Rural Modjokuto*. Cambridge: The MIT Press.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Kluckhon, Clyde 1984. "Cermin bagi Manusia", dalam Parsudi Suparlan (Ed.). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 69-109.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kusnadi, Hari Sulistiyowati, Adi Prasodjo, dan Sumarjono. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Legg, Keith R. 1983. *Tuan, Hamba, dan Politisi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.



Purnomo, Gatot Sugeng. 2005. *Strategi Bertahan Hidup: Respons Nelayan terhadap Perubahan Kondisi Daerah Penangkapan Ikan di Selat Madura*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.

Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Widayati, Sri Wahyu 2001. "Prototipe Kepemimpinan Masyarakat Jawa dalam Karya Sastra Jawa Pesisiran", *Makalah Kongres Bahasa Jawa III*, di Yogyakarta, 15 Juli.